

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Sumatera Selatan pada bulan Juli 2025 mengalami Inflasi sebesar 0,14% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Oktober 2025 sebesar 2,02% dan Inflasi tahunan sebesar 2,88% (yoy).Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Juli 2025 (mtm) di Sumatera Selatan antara lain: dari komoditi makanan/pangan: bawang merah, tomat, cabai rawit, daging ayam ras. Non makanan: bensin, sekolah menengah atas emas perhiasan, dan sekolah dasar. Komoditi andil inflasi tahunan (yoy) antara lain: makanan: bawang merah, beras, tomat, minyak goreng, mie kering instant, sigaret kretek mesin (SKM), kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT). Non Makanan: emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga.
2. Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2025 mengalami Deflasi sebesar 0,04% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Agustus 2025 sebesar 1,98% dan Inflasi tahunan sebesar 3,04% (yoy).Komoditi dominan yang
3. menyebabkan terjadinya Deflasi bulan Agustus 2025 (mtm) di Sumatera Selatan antara lain: dari komiditi makanan/pangan: daging ayam, tomat, cabe rawit, dan beras. Non makanan antara lain; emas perhiasan, angkutan udara dan kontrak rumah. Komoditi andil inflasi tahunan (yoy) antara lain: makanan : bawang merah, beras, tomat, minyak goreng, ikan patin, sigaret kretek mesin (SKM), Sigaret kretek tangan (SKT) dan mie kering instant. Non Makanan : Emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga.
4. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan September 2025 mengalami Inflasi sebesar 0,27% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. September 2025 sebesar 2,25% dan Inflasi tahunan sebesar 3,44% (yoy). Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan September 2025 (mtm) di Sumatera Selatan antara lain: dari komiditi makanan/pangan: cabai merah, daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), ayam hidup, sigaret kretek tangan (SKP), dan jeruk. Non makanan: Emas perhiasan. Komoditi andil inflasi tahunan (yoy) antara lain: bahan makanan: cabai merah, bawang merah, beras, tomat, daging ayam ras, minyak goreng, ikan patin, mie kering instant, telur ayam ras dan sigaret kretek mesin (SKM). Dan Non Makanan: emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga.
5. Tingkat Inflasi daerah IHK di Wilayah Sumatera Selatan untuk bulan Oktober 2025 D. Desember 2025, sebagai berikut:

BULAN	TINGKAT INFLASI KOTA PALEMBANG (%)		TINGKATINFLASI KOTA LUBUK LINGGAU (%)		TINGKAT INFLASI KAB MUARA ENIM(%)		TINGKAT INFLASI KAB OKI (%)		TINGKAT INFLASI PROVINSI SUMATERA SELATAN(%)	
	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)
JULI	0,17	2,63	0,21	2,61	0,06	3,45	0,05	3,60	0,14	2,88
AGUSTUS	-0,07	2,83	0,07	2,92	0,22	3,42	-0,11	3,67	-0,04	3,04
SEPTEMBER	0,30	3,28	0,27	3,26	0,35	3,81	0,03	3,86	0,27	3,44

Pada bulan Juli 2025, tingkat inflasi di keempat kota IHK terkendali dengan baik meskipun dibawa target capaian nasional $2,5\% \pm 1\%$. Tingkat Inflasi tahunan terendah ada pada daerah Lubuk Linggau sebesar 2,61% dan tertinggi di Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 3,60%.

Pada Bulan Agustus 2025, Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan tahunan (yoy) masih

dibawa target capaian daerah maupun nasional yaitu 3,04%. Tingkat Inflasi tertinggi ada pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (3,67%), dan terendah di Kota Palembang (2,83%). Sedangkan untuk tingkat inflasi bulanan (mtm) tertinggi ada di Kabupaten Muara Enim (0,22%)

Pada Bulan September 2025, Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan tahunan (yoy) terkendali dengan baik walaupun masih dibawa target capaian daerah maupun nasional yaitu 3,44%. Tingkat Inflasi tertinggi ada pada Kabupaten Ogan Komering Ilir(3,86%), dan terendah di Kota Lubuk Linggau (3,26%).

9. Kondisi menunjukkan Tekanan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 dipengaruhi oleh tekanan harga emas dan produk hortikultura. Dan untuk Triwulan IV kedepan kemungkinan tekanan inflasi masih berlanjut seperti pada triwulan III. Beberapa komoditi pangan yang dominan andil di triwulan III antara lain Beras khususnya beras medium dikarenakan adanya kenaikan HET di jenis beras medium semula 12.500/Kg menjadi 13.500/kg, daging ayam ras, Tomat dan Minyak Goreng Dan berdasarkan prediksi Bank Indonesia, tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 diperkirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2025, **Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada triwulan III 2025, antara lain emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan tomat.** Peningkatan harga emas perhiasan sesuai dengan tren kenaikan harga emas global di tengah permintaan yang terindikasi kuat. Adapun peningkatan harga cabai merah dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan permintaan beras premium di tengah stok yang menurun memasuki musim tanam. Adapun kenaikan harga tomat disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat gangguan cuaca, khususnya di daerah Lahat dan Muara Enim dikarenakan curah hujan yang tinggi di daerah sentra (Muara Enim dan Pagaralam) sepanjang triwulan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan (%yoy) tertinggi, diantaranya cabai merah sebesar 0,39%; bawang merah sebesar 0,29%; beras sebesar 0,19%; tomat sebesar 0,18%; serta daging ayam ras dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,12%. Komoditas ini perlu juga menjadi perhatian di masa triwulan III tahun selanjutnya, dan kedepannya perlu untuk mewaspadai komoditi tersebut.

Perkembangan harga beras perlu menjadi perhatian, meskipun dari Pemerintah Pusat telah melakukan Program Bantuan Pangan Beras gratis dan program beras SPHP namun di lapangan ditemukan bahwa harga beras diterima oleh konsumen akhir masih ada yang menjual melebihi HET yang kemungkinan dibeli oleh pelaku dari RPK atau BUMN dan menjual kembali di atas HET yang ditetapkan Pemerintah Pusat yaitu Rp 12.500/kg di tingkat konsumen.

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang mulai berlaku pada Agustus 2025, dari Rp12.500/kg menjadi Rp13.500/kg di Zona I termasuk Sumatera Selatan, serta kenaikan harga gabah di tingkat petani turut memperkuat tekanan harga. Kondisi ini

mendorong masyarakat beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi, diperkuat oleh permintaan dari daerah sekitar Sumatera dan Jawa. Kombinasi faktor tersebut membuat beras kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025. Rata-rata harga beras medium triwulan III adalah Rp. 13.231/kg, dan Beras Premium rata-rata Rp.14.655/kg.

Perlu ada perhatian terhadap komoditi Minyakita (minyak goreng curah yang dikemas) di pasaran, yang merupakan salah satu program subsidi minyak dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan harga minyak di pasaran, perlu adanya pengawasan terhadap pendistribusiannya. Karena di pasar juga masih ada yang menjual minyakita di atas HET Rp. 15.700/liter di atas HET berkisar Rp.16.000 - Rp.16.500 /liter. Rata-rata harga minyakita berdasarkan data SP2KP dinas perdagangan Sumsel pada triwulan III adalah Rp.16.431/liter.

Tekanan inflasi daging ayam ras pada Triwulan III 2025 di Sumatera Selatan terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya input produksi, yaitu harga Day Old Chick (DOC) broiler dan pakan ternak berbasis jagung. Harga DOC broiler secara nasional pada September 2025 mencapai sekitar Rp7.500 per ekor, naik dari Rp6.000 per ekor pada bulan sebelumnya, sementara harga jagung pakan ternak berada di level Rp6.599/kg, lebih tinggi dibandingkan HAP Rp5.800/kg dan naik dari bulan sebelumnya Rp6.459/kg. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi ayam ras di tingkat peternak, yang kemudian mendorong kenaikan harga jual di pasar. Berdasarkan data SP2KP Untuk harga daging ayam ras pada triwulan III rata-rata Rp. 31.928/kg, dibanding triwulan II rata-rata Rp. 30.133/kg. Sedangkan telur ayam ras harga rata-rata Rp. 26.584/kg, harga-harga tersebut belum melewati Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Bulan Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025, dalam mengatasi masalah pada triwulan II melalui strategi 4k (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif), yaitu:

A. Keterjangkauan Harga melalui:

1. Pemerintah Daerah terus melaksanakan operasi pasar/pasar murah bekerja sama dengan BUMN/BUMD/Perbankan dengan memberi subsidi ongkos angkut dan memberikan subsidi harga serta pemberian komoditi penyumbang andil inflasi secara gratis kepada masyarakat, pada triwulan III beberapa jadwal GPM yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan, Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan pasar Murah, yaitu;
 - Selasa tanggal 8 Juli 2025 bertempat di lapangan Fasilitas Umum Perumahan Sukabangun indah II jl. Soak permai Palembang;
 - Selasa tanggal 15 Juli 2025 GPM DI Kantor Camat Ilir Timur I Palembang jl. Mayor Santoso;
 - Jumat tanggal 8 Agustus 2025 dalam rangka ulang tahun TVRI ke-63 di kantor TVRI sumsel Jl Balap Sepeda;
 - Rabu tanggal 20 Agustus 2025 bertempat di kelurahan Talang Kelapa Palembang;
 - Kamis tanggal 4 September 2025 bertempat di Kantor RRI Palembang jalan Radio.
 - Pasar Murah di kantor Dinas ketahanan tanggal 18 September 2025 bertempat di

Kantor DKPP Provinsi Sumatera Selatan

- Operasi Pasar Murah tanggal 18 September 2025 bertempat di Kantor DKPP Provinsi Sumatera Selatan
 - Operasi Pasar Murah tanggal 23 September 2025 bertempat di UPTD Pengelolaan Terminal dan UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau Provinsi Sumatera Selatan
 - Operasi Pasar Murah tanggal 24 September 2025 bertempat di Kantor DKPP Provinsi Sumatera Selatan
 - Pada Triwulan III tahun 2025 tercatat 480 pelaksanaan OPM/gpm/Pasar murah se-Sumatera Selatan hingga bulan September 2025.
2. Penyaluran Bantuan Pangan Beras tahun 2025 dilaksanakan dalam 2 tahap, telah dilaksanakan melalui Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, Tahap I telah dilaksanakan 100% untuk bulan Juni s.d. Juli 2025 dengan total pagu 101.880 kg.
 3. Pemantauan harga dan stok melalui Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Panel Harga, dan Aplikasi lainnya untuk memastikan kebutuhan tersedia bersama tim Satgas Pangan Polda dan Instansi terkait serta melakukan sidak ke pasar, gudang, distributor dan produsen serta pengecekan stok barang dan harga.
 4. Pelaksanaan monitoring harga secara rutin ke pasar tradisional oleh TPID tingkat Provinsi (Dinas Perdagangan Pov. Sumsel, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BI melalui SHP, maupun Kab / Kota).
 5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menggelar Pasar Tani secara rutin setiap Rabu dan Jumat.
 6. Pemasangan spanduk MinyaKita dan HET di berbagai titik dan distributor.

B. Ketersediaan Pasokan, melalui:

1. Optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 sebagai kegiatan berkelanjutan melalui berbagai inovasi antara lain pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 yang terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) untuk 1.020 rumah tangga dan 17 KWT se-Sumatera Selatan dengan komoditas bawang merah dan cabai, GSMP Panti Sosial untuk 10 panti sosial di Sumatera Selatan dengan komoditas hortikultura, perikanan, dan peternakan (ayam), serta GSMP Goes to Office untuk seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Selatan dengan fokus komoditas rimpang.
2. Pengembangan lumbung pangan (food station) melalui peningkatan produksi pangan/hortikultura seperti pada komoditi padi, jagung, kedelai, bawang merah dan aneka cabe (cabe besar dan cabe rawit).
3. Di sektor Hulu produksi Pertanian khususnya tanaman pangan/padi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pengamanan tanaman (standing crop) yang saat ini akan panen, percepatan panen dengan alat mesin pertanian (combine Harvester), meningkatkan pemanfaatan bibit unggul lokal dan melakukan percepatan tanam IP-200 lahan lebak atau IP-300 lahan-lahan irigasi, dan mengintensifkan pemantauan dan pendampingan dari penyuluh kepada petani dan perluasan lahan (oplah).
4. Pelaksanaan Pembelian Beras Bulog oleh Pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan terlaksana dengan lancar hingga bulan September 2025. Penyaluran beras ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BULOG Kanwil Sumatera Selatan dan Babel untuk penyerapan Gabah petani dan menjaga stabilitas harga beras.

Optimalisasi pembiayaan pertanian, untuk penguatan kelembagaan (penyuluh) dan

- 5.
6. Tanam cabai serentak bersama Kepolisian dan melakukan tanam jagung serentak bersama TNI di 17 kabupaten/kota.
7. Kolaborasi bersama BULOG, satgas pangan, Permerintah Daerah dan instansi terkait untuk percepatan penyaluran beras SPHP dan pendistribusian beras cadangan pangan (Program Bantuan Pangan Beras).
8. Bantuan media padi apung yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada kegiatan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X 13-15 September 2025.
9. Panen pada program Pilot Project Padi Apung di kawasan Jakabaring, Palembang, untuk menguji 44 varietas padi di lahan rawa. Hasil panen menunjukkan produktivitas antara 2,4 hingga 5,6 ton per hektare, dan menjadi acuan untuk menentukan varietas unggul yang paling sesuai bagi pengembangan pertanian rawa di Sumatera Selatan pada bulan September 2025).

C. Kelancaran distribusi:

1. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan menuju daerah centra produksi, food estate dan strategis.
2. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui peningkatan Sarana prasarana di Pelabuhan Tanjung Api-Api.
4. Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi di daerah sentra produksi pangan.
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi “Pentas Sitepat” Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terdapat 9 sistem informasi, antara lain; Sitampan, Sihorti, Sisuluh, Sisaras, Sibenih, Sibipop, Sipasti, Sipeta, Sibejajo.
6. Pemberian subsidi harga, subsidi angkutan (termasuk melalui Fasilitas Distribusi Pangan/FDP), dan subsidi operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan OPM di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
7. Penandatanganan 5 MoU/PKS KAD antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk komoditas beras dan pakan ternak melalui skema G2G dan B2B. Turut dilaksanakan penandatanganan PKS antara CV Bumi Nusantara Subang dan Perumda Pasar Palembang Jaya untuk komoditas beras.

D. Komunikasi yang efektif:

Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dalam hal Upaya pengendalian Inflasi Daerah melalui strategi Komunikasi yang Efektif, antara lain:

1. Rilis infografis dan siaran pers inflasi secara berkala.
 2. Publikasi informasi jadwal OPM/GPM melalui media sosial dan kanal informasi lainnya.
 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin TPID setiap awal minggu.
 4. Pemantuan/koordinasi secara langsung di lapangan terhadap perkembangan kegiatan GSMP MENYALA se Sumatera Selatan tahun 2025.
 5. Pelaksanaan Rakor, HLM dan Capacity Building TPID Provinsi, Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan;
- Tanggal 8 Juli 2025 dilaksanakan di ballroom Hotel Novotel Palembang, Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Bpk Edward Candra)

dan HLM dilaksanakan dan dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan Bpk Herman Deru, serta Pelaksana Capacity Building dengan Narasumber Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri, Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI .

6. Laporan 9 (Sembilan) langkah pengendalian inflasi daerah kepada Irjen Kemendagri dilaksanakan setiap hari kerja sebelum jam 14.00 WIB melalui tautan <https://bit.ly/waspengendaliinflasi/2024>.
7. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, rapat teknis dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama stakeholder sinergi Bersama TPID Kab/kota.
8. Sosialisasi, publikasi, edukasi dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk mereduksi “waste food” dan informasi yang positif ketersediaan bahan pangan dan perkembangan harga agar masyarakat merasa aman tidak “panic buying”.
9. Sinkronisasi dan Pemanfaatan Data Early Warning System (EWS) Neraca Pangan dan Analisa trend kenaikan inflasi sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi program pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta langkah penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 dari 4 K, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sepanjang Triwulan III 2025, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah tercatat sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kali, meningkat hingga 3 kali dibandingkan triwulan II 2025 serta apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 475 kali. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penugasan beras SPHP dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog, yang menyebabkan peningkatan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat. Selain melalui OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP, TPID Sumatera Selatan selalu memastikan keterjangkauan harga komoditas melalui 1.003 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, dan OKU. RPK yang merupakan mitra Bulog ini memperoleh pasokan komoditas langsung dari Bulog dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, distribusi pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok) milik Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov. Sumatera Selatan, Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya, serta OKI-Mart dan OKI-Jek milik Pemerintah Daerah Kab. OKI dan BUMD Bande Seguguk. Pemantuan terhadap harga pangan dan penyediaan bahan pangan serta pelaksanaan pasar murah/GPM untuk mewujudkan harga komoditi pangan yang terjangkau oleh masyarakat perlu terus untuk dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok dan Antispasi terhadap kenaikan beras SPHP diawal bulan mei 2025 dan tetap aktif melaksanakan sidak pasar atau monitoring ke mitra distribusi beras SPHP agar harga beras dikonsumsi tidak melebihi HET. Kerjasama dengan Pemerintah Kab/kota, instansi vertikal dan horizontal serta melibatkan peran serta dari BUMN/BUMD dan pihak pengusaha/Swasta untuk ikut

dalam membantu mewujudkan pelaksanaan pasar murah.

2. Ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami kenaikan untuk komoditas padi dan bawang merah, namun mengalami penurunan untuk komoditas cabai merah dibandingkan dengan Triwulan II 2025. Peningkatan produksi padi dan bawang merah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perluasan lahan panen, penerapan teknologi dan intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, pendampingan petani, serta ketersediaan pupuk dan irigasi yang memadai. Sementara penurunan produksi cabai merah terutama disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung seperti musim penghujan yang menyebabkan gagal panen dan membusuknya tanaman di lahan. Program Panen Pilot Project Padi Apung yang dilaksanakan di kawasan Jakabaring, Palembang, merupakan inisiatif strategis yang diusung oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Provinsi Sumatera Selatan guna mengidentifikasi varietas padi yang paling adaptif terhadap karakteristik lahan rawa di wilayah tersebut. Melalui pengujian terhadap 44 varietas padi, termasuk varietas lokal Sumatera Selatan, diperoleh hasil panen dengan tingkat produktivitas berkisar antara 2,4 hingga 5,6 ton per hektare. Temuan ini menjadi referensi penting dalam memilih varietas unggul yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga mendukung upaya peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah, khususnya di lahan-lahan marginal seperti rawa.

Di sisi lain, TPID Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan launching dan serangkaian kegiatan dalam rangka Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025. Program ini terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa, GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Secara khusus, GSMP Menyapa Lingkungan Desa berfokus pada budidaya komoditas cabai dan bawang merah, yang melibatkan partisipasi 68 dasawisma (1.020 rumah tangga) dan 17 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan. Peserta program secara aktif melakukan budidaya di bawah pendampingan penyuluh pertanian lapangan serta melaporkan perkembangan budidaya kepada tim penjurian GSMP yang terdiri atas TPID Provinsi Sumatera Selatan dan PKK Provinsi Sumatera Selatan. Program GSMP diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari sekadar konsumen menjadi produsen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendorong terciptanya ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Berdasarkan data perkembangan margin distribusi harga Januari–September 2025, terlihat adanya perbedaan (disparitas) harga yang cukup bervariasi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pasar untuk 6 komoditas utama penyumbang inflasi.

Komoditas beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras di Sumatera Selatan menunjukkan stabilitas harga yang relatif stabil, didukung oleh margin distribusi yang terkendali. Sebaliknya, cabai merah dan cabai rawit masih mengalami disparitas harga yang cukup signifikan, dengan selisih harga yang dapat melebihi Rp20.000 per kilogram. Fenomena tersebut mencerminkan tantangan utama dalam kelancaran distribusi, khususnya pada komoditas hortikultura yang bersifat musiman serta rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi pasokan.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui strategi kelancaran distribusi, TPID Sumatera Selatan turut berperan melalui pemberian subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Dukungan ini ditujukan untuk menekan biaya transportasi

dan distribusi pangan, memperlancar alur distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga keterjangkauan harga di pasar.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Subang untuk komoditas beras dan pakan ternak. Melalui langkah-langkah kolaboratif tersebut, diharapkan disparitas harga dapat semakin diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan strategis di Sumatera Selatan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

4. Upaya pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, high level meeting (HLM), maupun capacity building TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Pada Triwulan III 2025, TPID Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah pengendaliannya. Sepanjang periode laporan, TPID se-Sumatera Selatan telah melaksanakan HLM, capacity building, dan rapat koordinasi TPID.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantuan terhadap harga pangan dan penyediaan bahan pangan serta pelaksanaan pasar murah/GPM untuk mewujudkan harga komoditi pangan yang terjangkau oleh masyarakat perlu terus untuk dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah jangka pendek dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok dan menjaga daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan tetap aktif melaksanakan sidak pasar atau monitoring ke mitra distribusi beras SPHP agar harga beras dikonsumsi tidak melebihi HET. Kerjasama dengan Pemerintah Kab/kota, instansi vertikal dan horizontal serta melibatkan peran serta dari BUMN/BUMD dan pihak pengusaha/Swasta untuk ikut dalam membantu mewujudkan pelaksanaan pasar murah.
2. Program upaya peningkatan produktivitas hasil produksi pangan perlu terus dilaksanakan untuk menjaga stok pangan daerah. Pelaksanaan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam rangka menjaga ketersediaan Pangan yang berkelanjutan. menjadi salah satu yang diupayakan agar mengubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penjual sehingga harapan stock/ketersediaan pangan ada tersedia disekitar masyarakat itu sendiri secara kontinue. GSMP Goes To School dan go to Office merupakan kelanjutan dari Program GSMP, agar kegiatan ini dapat terus berkelanjutan perlu peranan setiap Pemerintah Daerah/ stakeholders baik di tingkat pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota untuk menindaklanjuti dan disosialisasikan ke seluruh perkantoran maupun sekolah setiap tahunnya dan Tingkat daerah sampai dengan Kecamatan/Kelurahan/ Desa/RW dan RT.
3. Peningkatan produksi padi dengan pelaksanaan diversifikasi dan intensifikasi terus untuk digalakan, penerapan teknologi dan intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, pendampingan petani, serta ketersediaan pupuk dan irigasi yang memadai.
4. Pelaksanaan koordinasi antar anggota TPID Provinsi, TPID kabupaten/kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan tetap dilakukan dengan salah satunya menyelenggarakan Rakor se- Sumsel, dan aktif dalam rapat mingguan dengan TPIP, sehingga informasi mengenai kondisi inflasi IPH secara keseluruhan di daerah kab/kota dapat dipantau dan dapat ditindaklanjuti dengan segera dan tepat.